

SKRIPSI



UPAYA PENANGGULAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA

(Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2013)

OLEH:

MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN

B 111 10 011

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

**UPAYA PENANGGULANGAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN
TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2013)**

OLEH:

MUH. ALGIFARI NURHASAN

B 111 10 011

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2014

PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA PENANGGULANGAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA

(Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2013)

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN

B 111 10 011

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 23 Mei 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.

NIP. 19641231 198811 1 001

Sekretaris

Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.

NIP. 19660320 199103 1 005

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : MUH. ALGIFARI NURHASAN

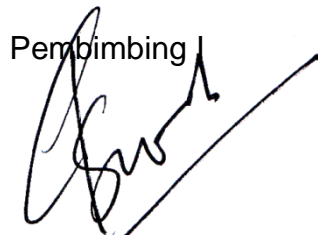
Nomor Induk : B 111 10 011

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Upaya Penanggulangan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap
Kejahatan Peredaran Narkotika (Studi Kasus di
Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2013)

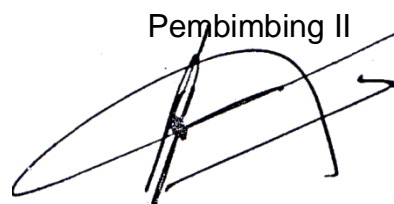
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2014

Pembimbing I


Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM.

NIP. 196412311988111001

Pembimbing II


Kaisaruddin K. S.H.

NIP. 196603201991031005

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

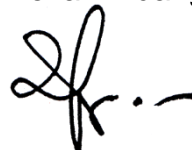
Merangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN**
Nomor Induk : **B 111 10 011**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **UPAYA PENANGGULANGAN OLEH PIHAK
KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN
PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI KASUS DI
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2010-2013)**

Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai
ujian akhir program studi.

Makassar, April 2014

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN (B111 10 011), **“Upaya Penanggulangan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2013)”** di bawah bimbingan Aswanto sebagai Pembimbing I, dan Kaisaruddin Kamaruddin sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang pada tahun 2010 hingga 2013, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang, serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Enrekang, dengan memilih tempat penelitian di Polres Enrekang dan Rutan Kelas IIB Kabupaten Enrekang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkotika yaitu faktor ekonomi, faktor individu, faktor lingkungan keluarga, dan faktor lingkungan sosial. Selanjutnya yang menjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika yaitu: 1. Upaya Pre-emptif yakni: a. Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mengenai peredaran dan bahaya narkotika; b. Memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho dan menghimbau lewat media cetak atau media elektronik tentang bahaya menggunakan narkotika. 2. Upaya Preventif yaitu dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang. 3. Upaya Represif yaitu dengan melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya. Adapun kendala-kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang yaitu: a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk bekerja sama dengan kepolisian Enrekang. b. Sulitnya menentukan lokasi transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Enrekang.

ABSTRACT

MUHAMMAD ALGIFARI NURHASAN (B111 10 011), "**Crime Prevention Efforts Police Against Narcotics Circulation (Case Study in Enrekang Years 2010-2013)**" under the guidance of Aswanto as Supervisor I, and Kaisaruddin Kamaruddin as Lecturer II.

This study aims to determine the factors that cause crime in Enrekang narcotics in 2010 and 2013, and to know the efforts that can be done by the police in tackling crime in Enrekang narcotics, as well as to determine the con-constraints faced by the police in tackling crime in Enrekang narcotics. This research was conducted in Enrekang, by selecting the research site at the police station and detention Enrekang Enrekang Class IIB.

The results of this study indicate that the factors that cause the occurrence of drug trafficking crime , namely economic factors , individual factors , family environmental factors , social and environmental factors . Furthermore, the efforts being made by the police in tackling drug trafficking crime , namely : 1 . Efforts Pre - emptive namely : a. Providing legal counseling to the public understanding and schools about the dangers of trafficking and narcotics ; b . Displaying flyers or billboards and appealed through print or electronic media about the dangers of using drugs . 2 . Preventive efforts is to tighten supervision on a routine patrol in a place prone to abuse and drug trafficking in Enrekang . 3 . Repressive efforts by performing the action explicitly , investigation and prosecution of narcotics offenders with rules and sanctions that could pose a deterrent to the perpetrators and become a threat to people who want to do the same in order to carry out the attack . As for the constraints of the police in tackling drug trafficking crime in Enrekang namely : a. Lack of community participation and the circulation of information about drug abuse to cooperate with police Enrekang . b . The difficulty of determining the location of the transaction is used by the perpetrators of abuse and drug trafficking in Enrekang.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikaum Wr.Wb.

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini berupa penulisan skripsi yang berjudul “ UPAYA PENANGGULANGAN OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP KEJAHATAN PEREDARAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2013)” dapat selesai dengan baik dan tepat waktu, yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menjadi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin semoga kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabatnya yang senantiasa memberikan petunjuk dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini.

Dengan rasa hormat, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua Penulis, Ayahhanda Nurhasan dan Ibunda Jumiaty yang tercinta dengan tetes keringat mereka bekerja hanya untuk dapat menyekolahkan penulis pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atas seluruh pengorbanannya yang telah merawat dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang, yang tetap selalu

memberikan dukungan, kepercayaan dan do'a yang luar biasa kepada Penulis.

Buat Neneku tersayang Jahura dan Juhara yang telah merawat Penulis sejak kecil hingga sekarang, terimah kasih atas semua pengorbanan dan do'aMu serta nasehatMu, semoga Allah SWT selalu Bersamamu. Dan kakaku Fitrayana Yuliandari, Fri Harmoko dan Seftian Buditomo dan adikku Retno Budiati Nurhasan yang selalu memberikan dukungan, semangat dan do'a kepada Penulis serta seluruh keluarga besarku atas bantuanya selama ini baik moril maupun materil sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih atas kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. selaku Pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H., selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. Bapak Abd. Asis, S.H., M.H. Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku dosen penguji saat ujian skripsi atas masukan dan saran untuk Penulis.
8. Ibu Dr. Harustiati. Andi Moein, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan, petunjuk, solusi, serta motivasi kepada Penulis dalam masalah perkuliahan.
9. Segenap Dosen pengajar dan Staf Pengurus Akademik beserta jajarannya di lingkup Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Bapak Kapolres, Kasat Reserse Narkoba dan Kepala Unit Reskrim Polres Enrekang yang telah banyak memberikan sumbangsih pikiran dan waktu kepada Penulis
11. Bapak Kepala Rutan Kelas IIB Kabupaten Enrekang dan seluruh staf.
12. Anak-anak BTP Blok K 235 Tolo, Bawang, Dandi Rudini, Ammank, Amma, Alif, Ocas, Gilang, Dipo, Aya, Ikbali, Kris, Wawan, Wiwin, Walid, Oga, Ivan, Rio, Zul. Yang selalu memberikan semangat dan motivasinya yang kalian bagikan selama ini.
13. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan Legitimasi 2010 yang telah memberikan banyak pengalaman dan persaudaraan.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan serta dukungannya pada penulis hingga terselesaikannya skripsi penelitian ini.

Dalam penelitian skripsi ini, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh sekali dari kesempurnaan baik dari segi pembahasan atau materi maupun teknik penyajiannya. Sehingga Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, serta kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Mei 2014

Penulis

Muhammad Algifari Nurhasan

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian	10
1. Penanggulangan.....	10
2. Kejahatan	10
3. Peredaran	15
4. Narkotika	15
B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	19
C. Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Narkotika	28
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Dan Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Analisis Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang	44
B. Upaya-upaya Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang	53
C. Kendala-kendala Pihak Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebijakan pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan obat jenis narkotika tertentu serta dapat digunakan untuk percobaan dan penelitian dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan .

Di dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat, dimana perkembangan itu selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri yang terjadi secara tidak seimbang. Hal ini disebabkan oleh ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin berkembang .perkembangan tersebut yang dapat menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau melakukan tindakan kejahatan, namun kemajuan teknologi yang semakin cepat dapat memberikan dampak positif maupun negatif dengan teknologi yang canggih ,dapat dilihat perkembangan di negara lain melalui berbagai media yang telah ada. Dan ini merupakan suatu kemajuan yang positif untuk membawa

kearah kemajuan bagi kehidupan masyarakat. Tetapi dalam hal ini dapat pula menimbulkan mengakibatkan dampak negatif yaitu berbagai macam kejahatan yang sangat merugikan. Sebagai akibat kemajuan teknologi sering menimbulkan masalah sebagai modus operandi kejahatan yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menciptakan penanggulangan dan pencegahan peredaran kejahatan narkoba dan obat – obatan terlarang.

Kejahatan narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, yang susah diungkap baik secara kualitas maupun kuantitas karna termasuk mempunyai organisasi yang terselubung dan tertutup serta terorganisir dengan jaringan secara internasional yang meliputi seluruh dunia dengan hasil-hasil kejahatan narkoba. Perkembangan kualitas kejahatan narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi masyarakat .

Peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkoba. Modus

operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dengan mobilitas tinggi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal.

Pada umumnya peningkatan tindak pidana narkoba yang disebabkan oleh dua hal, yaitu: *pertama*, bagi para pengedar dapat menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini terlepas dari kondisi perekonomian yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehingga memilih untuk melakukan suatu kejahatan pengedaran narkoba yang pada kenyataannya sangat menjanjikan keuntungan yang besar dengan waktu yang singkat. *Kedua*, bagi para pemakai, narkoba menjanjikan ketenteraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kekurangtahuan pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh penggunaan narkoba yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang cukup lama.¹

Masalah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu kesehatan, perkembangan industri obat-obatan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan hingga cara pembuatannya membuat segelintir oknum melakukan tindakan di luar dari prosedur yang telah ditetapkan khususnya dalam ilmu kesehatan. Perkembangan industri obat-obatan yang semakin meningkat terkadang disalahgunakan demi

¹ Kadarmanta, A. Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa. Forum Media Utama, Jakarta, 2010, hlm. 4

mendapatkan keuntungan materil yang lebih besar, sehingga berefek pada peredaran obat-obatan secara ilegal. Obat-obatan tersebut kemudian disalahgunakan sehingga menjadi bahan yang bisa membuat gangguan pada kesehatan. Narkotika yang selalu menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada generasi bangsa saat ini Indonesia adalah negara transit narkotika lagi, tetapi sudah menjadi negara yang konsumen dan produsen bahkan sudah menjadi pengeksport narkotika jenis ganja, heroin, kokain dan shabu-shabu dengan indikasi adanya pengirim paket dan kurir dari Indonesia ke luar negeri maupun paket dan kurir dari luar negeri yang di alamatkan langsung di Indonesia

Sehingga peredaran dan penyalahgunaan narkotika diawali dengan pemakaian pertama pada usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Sekolah Menengah Atas (SMA), karena tawaran, bujukan, dan tekanan seseorang atau kawan sebaya. Didorong rasa ingin tahu atau ingin mencoba, pelajar tersebut mau menerimanya, selanjutnya tidak sulit untuk menerima tawaran berikutnya. Dari pemakaian sekali, kemudian beberapa kali, akhirnya menjadi ketergantungan terhadap zat yang digunakan. Narkotika yang sering disalahgunakan dan menyebabkan ketergantungan antara lain *heroin (putauw)*, sabu (*metamfetamine*),

ekstasi, obat penenang dan obat tidur, ganja dan kokain. Tembakau dan ketergantungan.²

Pada kenyataannya, sekarang ini banyak terjadi peredaran narkoba secara ilegal. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan banyak korban, terutama kalangan muda yang termasuk klasifikasi usia produktif. Masalah ini bukan hanya berdampak negatif terhadap diri korban/pengguna, tetapi lebih luas lagi juga berdampak negatif terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat, perekonomian, kesehatan nasional, mengancam dan membahayakan keamanan, serta ketertiban.³

Upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin, yaitu pada masa anak usia Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai upaya yang berkesinambungan. Pencegahan yang dimaksud bukan semata-mata memberikan informasi mengenai bahaya narkoba, tetapi lebih menekankan pemberian penyuluhan kepada anak untuk bersikap dan berperilaku positif mengenai situasi penawaran/ajakan dan menolak tawaran/ajakan tersebut. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku manusia, bukan semata-mata masalah zat atau narkoba itu sendiri. Sebagai masalah perilaku, banyak variabel yang mempengaruhi, oleh karena itu informasi mengenai bahaya narkoba kepada anak dan remaja, tanpa usaha mengubah perilakunya dengan memberikan

² Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 4

³ *Ibid*,.hlm. 8

keterampilan yang diperlukan akan kurang bermanfaat, bahkan dikhawatirkan terjadi efek *paradoksial* (sebaliknya), yaitu meningkatnya keingintahuan atau keinginan mencoba pada anak dan remaja. Untuk mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan pencegahan secara komprehensif di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar para remaja yang merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan bangsa, tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba dan salah satu bagian penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus penyalahgunaan narkoba adalah penyidik, dalam hal ini penyidik kepolisian. Penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran penyalahgunaan narkoba. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. undang-undang ini mengatur sanksi hukumannya serta proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba.

Dalam proses penegakan hukum proses penyidikan merupakan salah satu yang substansial dan memiliki kepentingan yang mendasar. Hal ini dikarenakan proses penyidikan bertujuan untuk membuat suatu tindak pidana. Tugas ini merupakan tugas dari penyidik kepolisian, dalam pelaksanaan secara baik oleh penyidik, akan memudahkan pengungkapan suatu perkara kejahatan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dapat mengungkap menelusuri jalur peredaran narkoba .

Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seseorang yang menggunakan obat-obat terlarang/narkotika, yang dikategorikan sebagai korban, sehingga setiap pengguna penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun berupa pelayanan terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan oleh negara. Hal ini berbeda dengan para pelaku pengedar narkotika yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan ancaman pidana pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peredaran narkotika serta dampaknya sebagaimana Penulis uraikan diatas, saat ini tidak hanya melanda kota-kota besar yang ada di Indonesia tetapi juga sudah melanda ke wilayah kabupaten, termasuk Kabupaten Enrekang. Hal ini juga ditegaskan oleh Wakil Bupati Kabupaten Enrekang, H.M. Amiruddin dalam sebuah acara Sosialisasi Anti Narkoba di ruang pola kantor Bupati Enrekang, Rabu (12/3/2014), bahwa peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang sudah sangat memprihatinkan dan dapat merusak generasi muda. Oleh karena itu, Penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan ini yang nantinya akan tertuang dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Upaya Penanggulangan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Kejahatan Peredaran Narkotika (Studi Kasus di Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2013) ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang ?
2. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang ?
3. Kendala-kendala apakah yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi terjadinya kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang.
3. Untuk mengetahui kendala apakah yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan para penegak hukum pada khususnya dalam mencegah dan menanggulangi peredaran narkoba.

2. Dapat menambah wawasan pengetahuan Penulis khususnya di bidang hukum dan dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai bahan referensi bagi mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih jauh mengenai masalah narkoba serta dapat menjadi koleksi tambahan perpustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan secara integral dan dinamis antara unsur-unsur aparat dan potensi masyarakat, selain itu merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan, untuk merubah sikap dan perilaku, cara berpikir dari kelompok masyarakat yang sudah mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyalahgunaan serta tindak perdagangan atau peredaran gelap narkoba. Upaya penanggulangan kejahatan yang di maksudkan adalah untuk menciptakan suatu kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal terhadap bahaya-bahaya bagi pelaku yang memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya dapat diharapkan menentukan rencana masa depannya dengan hidup yang sehat, produktif, kreatif dan bermanfaat bagi dirinya maupun dengan lingkungannya. Kebijakan peredaran gelap narkoba, tetap mengacu pada piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional yang ada.

2. Kejahatan

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula

pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*).⁴

Secara etimologi, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, mencuri, merampok, menipu, korupsi dan lain-lain. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara. Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan pengertian kejahatan secara mendetail, akan tetapi kejahatan itu diatur dalam buku dua KUHP yaitu Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan bahwa:⁵

“Kejahatan secara yuridis adalah kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun)”.

Adapun Edwin H. Sutherland menekankan bahwa:⁶

“Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

Selanjutnya W.A. Bonger menyatakan bahwa:⁷

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan

⁴A.S. Alam, Op.Cit., 15.

⁵R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politea, 1985, hlm. 13.

⁶Edwin H. Sutherland, Op.Cit., 14.

⁷W.A. Bonger, Op.Cit., hlm. 14.

kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan”.

Lebih lanjut A.S. Alam memberikan dua sudut pandang tentang kejahatan, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

⁸A.S. Alam, Op.Cit., 16.

Contoh di dalam hal ini adalah bila seseorang muslimin meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Seirama dengan A.S. Alam yang telah memberi dua sudut pandang dalam memberi penjelasan tentang kejahatan, Gerson W. Bawengan membagi pula tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:⁹

1) Pengertian secara praktis

Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.

2) Pengertian secara religius

Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

3) Pengertian secara yuridis

Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang

⁹Gerson W. Bawengan dalam bukunya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2001, hlm. 27.

disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiscal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Hal itu sejalan dengan A.Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono yang memberikan penjelasan mengenai kejahatan sebagai berikut:¹⁰

1) Segi sosiologi

Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan amoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.

2) Segi psikologi

Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.

3) Segi yuridis

Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendefinisian suatu kejahatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun hal pokok dari suatu kejahatan adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang telah bertentangan dengan nilai-nilai

¹⁰A.Qirom Syamsuddin dan E. sumaryono, dalam bukunya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2001, hlm. 18.

dalam masyarakat dan/atau sikap, perilaku, dan tindakan yang telah dirumuskan oleh negara sebagai kejahatan.

3. Peredaran

Pengertian peredaran adalah suatu proses, siklus, kegiatan atau serangkaian kegiatan yang menyalurkan/memindahkan sesuatu (barang, jasa, informasi, dan lain-lain). Peredaran dapat juga diartikan sebagai impor, ekspor, jual beli di dalam negeri serta penyimpanan dan pengangkutan. Pengertian peredaran adalah setiap kegiatan yang menyangkut penjualan serta pengangkutan, penyerahan, penyimpanan dengan maksud untuk dijual.¹¹

Sedangkan menurut Penulis sendiri peredaran merupakan suatu proses pemindahan hak atas suatu barang kepada pihak lain.

Pengertian peredaran narkoba menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, mendefinisikan bahwa:

“Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”.

4. Narkoba

Narkoba adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di

¹¹ Kamus Tata Hukum Indonesia, Padmo Wahjono, 1987 hlm.208

kalangan remaja ingin menggunakan narkoba meskipun tidak menderita penyakit apapun. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkoba (obat). Bahaya penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkoba, pengertian narkoba adalah:

“Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”

Secara umum, yang dimaksud dengan narkoba adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkoba yang dipergunakan dalam hal ini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu

- a. Memengaruhi kesadaran.
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:

1. Penenang.
2. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesta industri obat-obatan, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya. Namun kemudian diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya yang bisa menimbulkan ketergantungan. Dengan demikian, maka untuk jangka waktu yang agak panjang, si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan.

Sudarto mengatakan bahwa:

“Kata narkotika berasal dari perkataan Yunani *“Narke”*, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa”.

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa:

“Narcotic are drugs which product insensibility or stuporduce to their depressant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone)”.

Artinya:

“Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (mophine, codein, methadone)”¹².

Sehubungan dengan adanya Penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) di tetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terbagi ke dalam golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Dalam ketentuan ini yang dimaksud Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.

2. Narkotika Golongan II

Dalam ketentuan ini dimaksud dengan Narkotika golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

¹²Muh. Taufik Makaro,dkk, *Tindak Pidana Nakotika*,penerbit Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 17-18.

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contoh: Morfin, Petidin.

3. Narkotika Golongan III

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Codein.

B. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangan dunia kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan.

Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :¹³

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit).

¹³ Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 15-20

Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan mana yang tidak.

Menurut Beccaria bahwa:¹⁴

“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut.
That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure”.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekali pun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

2. Teori Neo Klasik

Menurut Made Darma Weda bahwa:¹⁵

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas.

Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

¹⁴Beccaria, dalam bukunya Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 15

¹⁵Weda, Made Darma, *Op.Cit.*, hlm. 15

¹⁶*Ibid.*, hlm. 15

- a. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - b. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- 2) Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
 - 3) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
 - 4) Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut Made Darma Weda bahwa:¹⁷

Dalam teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.”¹⁸

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan social akan mengurangi terjadinya kejahatan.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 16

¹⁸*Ibid.*, hlm. 16

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang enam teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Keenam aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keenam teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa:¹⁹

“Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminalis born*)”.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa:²⁰

“Ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya”.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu:²¹

- a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- b. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;

¹⁹Cesare Lombroso, dalam bukunya Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 16

²⁰*Ibid.*, hlm. 16

²¹*Ibid.*, hlm. 16

- e. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*.

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa:²²

“Tidak ada tanda- tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe”.

Menurut Goring bahwa:²³

“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.”

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

²² Goring, dalam bukunya Weda, Made Dharma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 18

²³ *Ibid.*, hlm. 18

2) Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard bahwa:²⁴

“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

3) Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi bahwa:²⁵

“Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini memberikan arti penting kepada kekacauan-kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi social”.

²⁴ Goddard, dalam bukunya Weda, Made Dharma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 18

²⁵ Weda, Made Dharma, *Op.Cit.*, hlm. 19

4) Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.

Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan social (*crime as a function of social environment*).²⁶ Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan social. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

5) Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis.

Menurut Tarde bahwa:²⁷

“Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.”

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai

²⁶ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁷ Tarde, dalam bukunya Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 20.

promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde bahwa:²⁸

“Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”.

Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6) Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda, bahwa:²⁹

“Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR)”.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 20.

²⁹ Weda, Made Darma, *Op.Cit.*, hlm. 20.

C. Pengaturan Pidana Terhadap Kejahatan Narkotika

1. Formulasi pidana

Formulasi pidana yang merupakan suatu bentuk perumusan perbuatan pidana yang dituangkan sebagai ketentuan pidana. Dapat dikatakan dengan memahami formulasi pidana maka dapat diketahui sampai sejauh pembentukan undang-undang telah merumuskan dengan tetap penegakan hukum yang dikehendaki berdasarkan politik hukum yang di ambil.

Menurut Satjipto Raharjo, proses penegakan hukum menjangkau pula sampai kepada tahapan pembuatan undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penekanan hukum itu nanti dijalankan. Hal ini berarti bahwa kegagalan penegakan hukum berhulu pada perumusan awal pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, bentuk formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah dibuat pembentukan undang-undang berpengaruh besar pada proses penegakan hukum di bidang kejahatan narkotika.³⁰

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan undang-undang tindak pidana diluar KUHP

³⁰ AR.Sujono dan Bony Daniel. Komentar dan Pembahasan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penerbit Sinar Grafika.2011.hlm. 211.

rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.

Tidaklah mengherankan apabila formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan formulasi pidana KUHP karena hal ini merupakan keonsekuensi dari kehendak dari pembuat undang-undang itu sendiri. Pencerminan pembentuk undang-undang ini dapat diketahui dari konsiderannya yang mana tindak pidana narkotika dipandang sebagai ,”sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar dari kehidupan masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat dan seksama atas penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana narkotika tidak hanya masuk dalam kejahatan yang luar biasa, lebih dari itu, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara”. Begitu luar biasanya tindak pidana narkotika, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , diterangkan kembali bahwa,” tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisai dengan jaringan yang luas merupakan yang bekerja secara rapih dan sangat

rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional”. Sehingga adalah wajar apabila cara-cara pemberantasan tindak pidana narkoba perlu dilakukan dengan sangat serius.

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba saja, tetapi juga penyalahguna prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba.“ pemberatan sanksi pidan ” ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupaun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksilmal.

Di satu sisi ada semangat yang laur biasa pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalah guna narkoba baik secara pecandu maupaun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda)
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda)

3. Dalam bentuk kumulatif (penjara dan denda)
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

Jika dalam Pasal 10 KUHP menentukan jenis-jenis pidana terdiri dari :

- a. Pidana pokok :
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu,
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, maka jenis-jenis pidana dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok, yaitu 1. Pidana mati, 2. Pidana penjara, 3. Denda serta, 4. Kurungan sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka aturan pidanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka diberlakukan aturan pidanaan dalam

Undang-Undang Narkotika, sebagai contoh ketentuan Pasal 148 yang berbunyi:

“Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar dan pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana prekursor narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”.

Atruan pemidanaan sebagaimana ditunjukkan Pasal 148 ini tentulah berbeda dengan KUHP, yang mana pidana pengganti atas denda yang tidak dibayar dalam KUHP adalah “kurungan” bukannya “penjara”.

Selanjutnya sebagaimana dengan pidana tambahan, menurut Penulis sepanjang diatur tersendiri oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentulah berlaku ketentuan tersebut misalnya mengenai perampasan barang-barang tertentu (Pasal 101), namun demikian karena ketentuan mengenai pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim tidak ditentukan tersendiri, maka berlaku ketentuan sebagaimana atauran pemidanaan dalam KUHP, sehingga meskipun tidak dirumuskan pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim merupakan bagian aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahkan dengan tidak adanya amar putusan pidana tambahan khususnya pencabutan hak-hak tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tertentu dapat mengakibatkan putusan dibatalkan, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan No.Reg.15/Mil/2000, tertanggal 27 januari 2001, sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah berupa penyalahgunaan Narkoba, yang oleh masyarakat maupun pemerintah dianggap sebagai kejahatan berat yang dapat merusak keluarga, maupun putusan Generasi Muda dan Negara, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak cukup dengan hukuman penjara dan denda, tetapi harus dijatuhi hukuman tambahan, yaitu: dipecat dari anggota TNI Kopassus dan oleh karenanya putusan Mahkamah Militer Tinggi II Jakarta harus dibatalkan

Yurisprudensi tersebut berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI, selaras dengan hal tersebut maka berlaku pula terhadap setiap orang dalam perkara warga sipil, sebagai contoh dilakukannya pegawai Negeri Sipil, tentulah pencabutan hak-hak tertentu juga harus dicantumkan dalam amar putusan.

2. Ketentuan Pidana

Jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggung jawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategori tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:³¹

³¹ Siswanto S. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU.Nomor 35 Tahun 2009)*, Tahun 2012, hlm. 256-281.

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117 untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba (Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa perlawanan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d));

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkoba antara lain:

- a. Tindakan Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128)

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- b. Tindak pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130)

Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau, b. pencabutan status badan hukum.

- c. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131).

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- d. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) :

Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut.

Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

- e. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberikan, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) :

Ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- f. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) :

Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan ataupun pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- g. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135).

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

- h. Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137)

Huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- i. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- j. Tindak Pidana bagi Narkotika atau Kapten Penerbangan yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- k. Tindak Pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BBN yang Tidak melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- l. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- m. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil pengujian (Pasal 142)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- n. Tindakan Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- o. Tindakan Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144)

Dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

- p. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147)

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi

terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Sebagaimana yang telah diungkapkan A.S Alam bahwa penanggulangan kejahatan empiric terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NNK, yaitu: Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contohnya, ditengah malam

pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak Negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang yang mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, khususnya pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang , Rumah Tahanan (Rutan) Kabupaten Enrekang dan instansi-instansi terkait lainnya, sebagai objek penelitian Penulis dalam upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkoba.

B. Jenis dan Sumber data

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan Penulisan skripsi ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam Penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara untuk mengumpulkan data, peneliti lakukan dengan teknik sebagai berikut :

- a. Untuk mengumpulkan data primer, dilakukan dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan

responden/narasumber yaitu pelaku dan pihak Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang.

- b. Untuk mengumpulkan data sekunder, dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus, bahan-bahan laporan, dokumen atau arsip, dan beberapa refensi buku, yang ada kaitannya dengan skripsi ini.

D. Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang

1. Data Kasus Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang Tahun 2010-2013

Berikut diketahui tingkat kejahatan narkotika yang terjadi pada kurun waktu tahun 2010-2013 di wilayah hukum Polres Enrekang sebagaimana terurai pada tabel 1 berikut:

Tabel 1
Jumlah Kejahatan Narkotika di Kabupaten Enrekang

No.	Tahun	Jumlah kejahatan narkotika yang terjadi	Keterangan
1.	2010	2 Kasus	P21
2.	2011	5 Kasus	P21
3.	2012	7 Kasus	P21
4.	2013	10 Kasus	P21
Jumlah		24 Kasus	

Sumber: Polres Enrekang Tahun 2014

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukan bahwa ada 24 kasus yang terjadi di Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 2010-2013. Dapat dilihat juga bahwa hampir semua kasus kejahatan narkotika tersebut dilanjutkan di tingkat penuntutan oleh

kejaksaan (P21). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Enrekang AKP. Irwanto dijelaskan bahwa setiap kasus kejahatan narkoba dalam hal penyelidikan dan penyidikan kasus kejahatan narkoba akan selalu sampai tahap berlanjut sampai pada kejaksaan (P21) .

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan narkoba yang terjadi di wilayah hukum polres Enrekang dari tahun 2010-2013, dapat dilihat melalui tabel 2 berikut :

Tabel 2
Bentuk-bentuk Kejahatan Narkoba yang terjadi di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2010-2013.

No.	Tahun	Tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai / mengkonsumsi narkoba	Tertangkap tangan menyalurkan, menjual, mengedarkan narkoba
1.	2010	1	1
2.	2011	3	2
3.	2012	5	2
4.	2013	4	6
Jumlah		13	11

Sumber: Polres Enrekang Tahun 2014

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa bentuk kejahatan narkoba yang banyak terjadi dengan jumlah sebanyak 13 kasus yaitu tertangkap tangan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai, serta memakai atau mengonsumsi narkoba. Sedangkan bentuk Tertangkap tangan menyalurkan, menjual, mengedarkan narkoba yaitu sebanyak 11 kasus.

Untuk mengetahui usia, jenis kelamin, dan pekerjaan para pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Enrekang, penulis menguaraikannya dalam tabel 3 berikut :

Tabel 3
Data usia, jenis kelamin, dan pekerjaan para pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Enrekang.

Data Usia, Jenis Kelamin, dan Pekerjaan Pelaku Kejahatan Narkoba di Kabupaten Enrekang	Tahun				Jumlah
	2010	2011	2012	2013	
Usia					
<17	-	-	-	-	-
18-20	-	-	1	-	1
21-30	2	4	2	4	12
>31	-	1	4	6	11
Jenis Kelamin					
Laki-Laki	2	5	7	9	23

Perempuan	-	-	-	1	1
Pekerjaan					
Pengangguran	-	-	2	-	2
Pelajar	-	-	1	-	1
Mahasiswa	-	-	-	-	-
Pegawai Negeri	-	-	1	-	1
Pegawai Swasta	2	2	-	3	7
Wiraswasta	-	3	3	7	13
TNI / POLRI	-	-	-	-	-

Sumber Data: Polres Enrekang Tahun 2014

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa usia pelaku yang terbanyak dari jumlah tahun 2010-2013 adalah usia berkisar 21-30 tahun sebanyak 12 orang. Selanjutnya para pelaku rata-rata laki-laki, dari tahun 2010-2013 hanya ada 1 (satu) perempuan yang menjadi pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Enrekang. Sedangkan pekerjaan pelaku yang lebih dominan adalah sebagai wiraswasta.

2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Peredaran Narkoba di Kabupaten Enrekang

Dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan peredaran narkoba yang merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk di kaji karna pada umumnya para kriminologi menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan melakukan kejahatan di pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang

bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang .

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, karna dari penyebabnya dapat di pengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Enrekang di temukan 24 kasus kejahatan narkoba. Diantara 4 kasus tersebut, Penulis melakukan wawancara langsung dengan 5 orang pelaku sebagai *sampling* (khusus dalam kasus 2013). Terhadap pelaku-pelaku tersebut Penulis memberikan beberapa pertanyaan yang sama yaitu identitas, kronologis kasus dan faktor-faktor penyebab para pelaku melakukan kejahatan peredaran narkoba. Dan dari hasil wawancara tanggal 27 maret 2014. Para pelaku mengemukakan faktor-faktor penyebab mereka melakukan kejahatan peredaran narkoba yaitu nampak dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4

Hasil Wawancara dengan pelaku kejahatan narkoba

1.	Basri alias Cari, beralamat di jln.Baranti, usia 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta.	
	Jenis kejahatan narkoba	Transaksi mengedarkan, menjual narkoba.
	Terjerat Pasal	Pasal 114 ayat (1) UU.No.35.tahun 2009
	Kasus	Basri mengakui bahwa telah melakukan kejahatan peredaran narkoba dengan melakukan transaksi 1 paket sabu-sabu. Dia di jebak temannya sendiri pada saat akan menjual barang tersebut karna dengan alasan tergiur dengan keuntungan yang besar serta faktor ekonomi yang mendesak.

2.	Rahmat alias Emet, beralamat di jln.Benteng, usia 26 tahun, pekerjaan wiraswasta.	
	Jenis kejahatan narkotika	telah tertangkap tangan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan mengkonsumsi barang tersebut seberat 2 gram bersama temannya .
	Terjerat pasal	Pasal 112 ayat (1) UU.No.35.tahun 2009
	Kasus	Alasan Rahmat menyalahgunakan narkotika hanya sekedar untuk menikmati dan kesenangan semata serta menambah kepercayaan dirinya dan pada akhirnya sudah merasa kecanduan.
3.	Muh. Darwis alias Awwis, beralamat di jln.Baranti, usia 21 tahun, pekerjaan Wiraswasta.	
	Jenis kejahatan narkotika	telah tertangkap tangan sedang transaksi menjual dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu.
	Terjerat Pasal	Pasal 114 ayat (1) UU.No.35.tahun 2009
	Kasus	Darwis mengaku telah menjual sabu-sabu kepada temannya yang bernama Yus. Hal ini disebabkan karna pelaku hanya ingin memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan cara mudah.
4.	Fatmawati alias Fatma, beralamat di jln.Takalla Timur, usia 33 tahun, pekerjaan wiraswasta.	
	Jenis kejahatan narkotika	Tertangkap tangan sedang memakai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
	Terjerat Pasal	Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009
	Kasus	Fatmawati mengakui telah mengkonsumsi barang tersebut karna awalnya hanya ingin sekedar mencoba serta bujukan dari teman sehingga pelaku menyalahgunakan barang tersebut.
5.	Ayyub alias Saleh, beralamat, jln ahmad yani, 25 tahun, pekerjaan wiraswasta.	
	Jenis kejahatan narkotika	Tertangkap tangan sedang memakai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
	Terjerat Pasal	Pasal 112 ayat (1) UU.No.35 tahun 2009
	Kasus	Ayyub memakai serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu disebabkan karena pengaruh dari teman dan kurangnya perhatian dari orang tua.

Sumber: Rutan Kelas IIB Enrekang Tahun 2014

Dari data yang di peroleh diatas melalui wawancara dengan beberapa narapidana / tahanan sebagai pelaku kasus kejahatan peredaran narkotika di kabupaten Enrekang. Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran narkotika sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini tingkat ekonomi yang rendah merupakan salah motif utama pengedar untuk mengedarkan narkotika karna faktor ekonomi merupakan alasan dalam menggunakan atau mengedarkan narkotika .Hal ini terjadi di karenakan ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran di mana-mana dan cara apapun akan dilakukan untuk memenuhi kubutuhan rumah tangga yang tidak sebanding dengan penghasilan para pelaku, maka dari itu pelaku memilih jalan mengedarkan narkotika untuk memperoleh pendapatan yang besar dengan mudah.

2. Faktor Individu

Dalam pola perilaku individu apabila menggunakan narkotika biasanya akan mengalami kecanduan untuk menggunakannya lagi hal ini disebabkan karena mereka yang menggunakan akan merasa ketergantungan obat dan berdampak pada di kehidupannya sendiri sehingga mereka tidak merasa percaya diri apabila tidak mengkonsumsi narkotika

karena dengan menggunakan narkoba mereka akan menjadi lebih percaya diri dan adapun yang hanya sekedar untuk ingin menikmati dan hanya untuk besenang-senang dengan menikmati narkoba tersebut.

3. Faktor lingkungan keluarga

Faktor lingkungan keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat memegang peran yang sangat penting dalam proses pertumbuhan seseorang dan anak-anak menjadi sampai dewasa dan mandiri. Keluarga juga merupakan suatu wadah yang paling awal dan fundamental untuk membentuk suatu kepribadian seseorang serta tempat menjalin kasih sayang diantara anggota keluarganya.

Pada masyarakat yang masih sederhana mungkin kehidupan keluarga antara orang tua dan anaknya hidup dalam kebudayaan yang harmonis, tidak banyak timbul pengaruh-pengaruh dari luar dan akibatnya tercipta suasana mantap dan harmonis tanpa mengalami kesulitan dalam memecahkan suatu masalah. Berbeda dengan masyarakat yang modern seperti sekarang ini, di penuhi berbagai aktifitas untuk keperluan keluarganya. Hal tersebut banyak menyita waktu orang tua, sehingga waktu yang semestinya mengurus anak tersita oleh hal tersebut. Apabila hal ini terjadi maka sulit bagi anak untuk mengemukakan dan mengadakan permasalahannya. Dengan

demikian akan membuat anak menjadi frustrasi karena tidak ada lagi tempat untuk menyampaikan masalah yang dihadapinya.

Kurangnya kepekaan orang tua untuk memahami permasalahan dan kebutuhan anak serta komunikasi yang tidak lancar, akan membuat anak untuk mencari jalannya sendiri demi untuk menyalurkan segala keinginannya. Pada akhirnya tanpa disadari oleh orang tua anaknya telah melakukan perbuatan dan tindakan yang mengarah kepada bentuk perilaku yang menyimpang. Selain itu kurangnya pengawasan orang tua terhadap anaknya dapat pula mengakibatkan anaknya menjadi korban kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkoba. Selain dapat mengakibatkan anak menjadi korban kejahatan khususnya penyalahgunaan narkoba, anak juga menjadi pengedar narkoba apabila tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Oleh karena itu butuh kesadaran diri dari orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya.

4. Faktor lingkungan sosial

Masyarakat merupakan lingkungan kedua setelah lingkungan keluarga yang dimana seseorang berpijak sebagai makhluk sosial. Di dalam masyarakat, seseorang dikelilingi orang-orang yang mentaati hukum, pada waktu yang sama juga dikelilingi oleh mereka yang tidak menaati hukum.

Sebagai makhluk sosial dengan sendirinya seseorang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan masyarakat sekitarnya, sehingga proses pertumbuhannya dengan sendirinya turut pula dipengaruhi dan dibentuk oleh masyarakat sekitarnya.

Masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendiri yang banyak menyediakan sarana yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Kurangnya fungsi kontrol masyarakat akan pengaruh budaya dari luar, akan memberi dampak kepada seseorang untuk melakukan pergaulan yang semakin bebas tanpa mengindahkan norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Bertolak dari uraian diatas, ternyata faktor pergaulan seseorang dengan lingkungan masyarakat dapat mempengaruhi terhadap seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

B. Upaya-Upaya Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Peredaran Narkotika di Kabupaten Enrekang

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang telah di upayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Resort Enrekang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti

para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kabupaten Enrekang.

Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian Enrekang yaitu sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emptif

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai/norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Irwanto selaku Kepala Unit Reskrim Polres Enrekang (tanggal 1 April 2014), mengatasi kejahatan peredaran narkoba pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu

1. Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai peredaran dan bahaya narkoba.
2. Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran narkoba.

3. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba. Selain penyuluhan, yang dilakukan yaitu memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya menggunakan narkoba.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian AKP Ridwan selaku Kepala Satuan Narkoba Enrekang bahwa upaya penanggulangan secara preventif yaitu dengan turut aktif dan tanggap oleh keluarga dan masyarakat dalam mengatasi terjadinya kejahatan peredaran narkoba, antara lain :

1. Memberikan pengawasan secara wajar terhadap pergaulan anak dalam lingkungan masyarakat.
2. Melakukan pemeriksaan urin tiap 3 (tiga) bulan sekali di sekolah-sekolah.
3. Dalam keluarga orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, serta orang tua harus menjadi tauladan yang baik terhadap anak-anaknya.

4. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan.
5. Melakukan penyamaran sebagai konsumen dengan maksud untuk menjebak dan menangkap para pelaku peredaran kejahatan narkoba di Kabupaten Enrekang.
6. Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang.
7. Menciptakan partisipasi dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya.

Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian Enrekang harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkoba. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

3. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak

dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.

Penanggulangan kejahatan peredaran narkoba dengan upaya represif yaitu melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran narkoba dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya.

C. Kendala-Kendala Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan Peredaran Narkoba di Kabupaten Enrekang

Kepolisian Resor Enrekang dalam melakukan upaya penanggulangan narkoba tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak polres Enrekang pada khususnya maupun masyarakat Enrekang pada umumnya.

Adapun hasil penelitian yang Penulis dapatkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi pihak polres Enrekang dalam menghambat pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkoba, meliputi:

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkoba untuk bekerja sama dengan kepolisian Enrekang.

Berdasarkan wawancara Penulis dengan Kasat Reskrim Polres Enrekang AKP Ridwan (tanggal 4 April 2014) dijelaskan bahwa:

“kurangnya informasi dari masyarakat jika ada persoalan terkait kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, padahal bila hal ini dibiarkan maka pelaku-pelaku akan semakin merajalela sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri, dan hal tersebut tentunya merugikan bagi masyarakat Enrekang”.

Hal yang tidak bisa diingkari bahwa partisipasi dan kontrol masyarakat masih sangat rendah karena rasa kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya perbuatan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, timbulnya rasa takut apabila jadi saksi, karena saksi bisa dijadikan ancaman sindikat pengedaran narkoba.

2. Sulitnya menentukan lokasi transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Enrekang

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Enrekang AKP. Irwanto (tanggal 4 April 2014) menjelaskan bahwa:

“yang juga menjadi kendala yang harus dihadapi oleh pihak kepolisian Enrekang adalah sulitnya menentukan lokasi transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Enrekang. Hal ini menjadi penting karena pihak kepolisian harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan dan pengamanan terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Enrekang”.

Hal ini dipertegas lagi oleh kesimpulan Penulis setelah melakukan wawancara dengan salah satu pelaku kejahatan

penyalahgunaan dan peredaran narkoba bahwasannya pelaku bekerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Para pelaku melakukan komunikasi untuk transaksi dengan menggunakan *handphone* dalam menentukan waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut.

Maka dari itu, hal terpenting adalah kesadaran masyarakat Enrekang dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pengungkapan para pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan melaporkan langsung apabila di lingkungan sekitar ada suatu dugaan tindak kejahatan narkoba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka Penulis dapat berkesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang yaitu:
 - a. Faktor ekonomi;
 - b. Faktor individu;
 - c. Faktor lingkungan keluarga ;dan
 - d. Faktor lingkungan sosial;
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan terjadinya kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang yaitu:
 - a. Upaya Pre-emptif yakni:
 - 1) Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mengenai peredaran dan bahaya narkoba.
 - 2) Memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho dan menghimbau lewat media cetak atau media elektronik tentang bahaya menggunakan narkoba.
 - b. Upaya Preventif yaitu dengan memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan

penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang

- c. Upaya Represif yaitu dengan melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran narkotika dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya.
3. Kendala-kendala pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkotika di Kabupaten Enrekang yaitu:
- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan informasi mengenai peredaran dan penyalahgunaan narkotika untuk bekerja sama dengan kepolisian Enrekang.
 - b. Sulitnya pihak kepolisian menemukan lokasi transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Enrekang.

B. Saran

Sebagai pelengkap tulisan ini, beberapa pemikiran Penulis tuangkan dalam bentuk saran sebagai berikut:

1. Melihat hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan peredaran narkotika adalah kurangnya perhatian dan informasi dari masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, maka sebaiknya ditingkatkan lagi pemberian

pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kerja sama dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba di Kabupaten Enrekang.

2. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, selain pihak kepolisian yang melakukan upaya penanggulangan kejahatan peredaran narkoba, maka masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya-upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan tidak diam disaat mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S.2010. *Pengantar Kriminologi*. Cetakan Ke-1. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.
- AR. Sujono dan Bony Daniel. 2011. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Cetakan Ke.1. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Kadarmanta, A. 2010. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Forum Media Utama, Jakarta.
- Kaligis, O.C. 2002. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*. P.T. Alumni: Bandung.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan H. Moh. Zakky. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto S. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU.Nomor 35 Tahun 2009)*. Cetakan Ke.1.Penerbit. PT Rineka Cipta.
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi* (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan). Politea: Bogor.
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Ke-1. ALFABETA: Bandung.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo: Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Refika Aditama: Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.